



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

MENGGALI POTENSI SUMBER DAYA ALAM PAPUA

Niken Paramita Purwanto
Analisis Legislatif Ahli Muda
niken.paramita@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Di tengah produksi minyak Indonesia yang masuk dalam tren penurunan lantaran sumur-sumur minyak banyak yang sudah *mature* atau tua, ternyata Indonesia masih menyimpan potensi sumber daya minyak di Papua, yang kini tengah dikembangkan oleh pemerintah. Sumber daya minyak tersebut berlokasi di wilayah atau area Warim di Papua dengan potensi minyak yang sangat besar. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan, area Warim menyimpan potensi minyak sebesar 25,968 miliar barel. Artinya, bila mengacu pada harga minyak mentah Indonesia (*Indonesian Crude Price*) pada April 2023 sebesar USD79,34 per barel dan dikalikan secara kotor, potensi minyak di area Warim Papua bernilai USD2,06 triliun atau Rp30.646 triliun.

Selain memiliki potensi minyak yang sangat besar, area Warim juga menyimpan potensi gas lebih besar dibanding Blok Masela, yakni sebesar 47,37 triliun kaki kubik (*trillion cubic feet/TCf*). Adapun Blok Masela hanya memiliki potensi cadangan gas sebesar 10,73 TCF. Potensi gas di area Warim hampir sama dengan potensi gas di Natuna (47 TCF), namun Natuna memiliki banyak kandungan CO₂-nya. Besarnya potensi gas yang dimiliki di area Warim tersebut perlu diupayakan untuk dikembangkan oleh pemerintah, khususnya Kementerian ESDM.

Blok Warim yang berlokasi dekat wilayah perbatasan Papua Nugini tersebut berada dalam area hutan nasional Lorentz. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkannya, Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto perlu meminta persetujuan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dengan demikian potensi sumber daya alam yang sangat besar tersebut dapat dimanfaatkan dan dikembangkan sehingga Indonesia tidak kehilangan devisa untuk impor.

Beberapa Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) telah ada yang menaruh minat, namun masih dalam proses peninjauan. Blok Warim sempat dipegang pengelolaannya oleh ConocoPhillips sebelum akhirnya dilepas pada pertengahan 2015. Saat itu, ConocoPhillips ingin fokus pada pengembangan lapangan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Selain itu, masalah logistik dan perizinan disebut menjadi alasan utama mundurnya KKKS asal Amerika Serikat tersebut dari Blok Warim.

Menurut Moshe Rizal, Ketua Komite Investasi Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas (Aspermigas), ada beberapa persoalan yang harus diselesaikan pemerintah untuk mengoptimalkan pengelolaan hulu minyak dan gas bumi (migas) di Indonesia bagian Timur. Hal yang paling krusial adalah persoalan infrastruktur yang kurang memadai di Indonesia bagian Timur dibandingkan dengan wilayah lainnya seperti di Jawa atau Sumatera. Hal itu membuat KKKS harus mengeluarkan anggaran lebih untuk belanja modal dan kegiatan operasional. Ketersediaan data juga masih minim dibandingkan dengan daerah lain, seperti Sumatera, Jawa, dan Kalimantan karena kegiatan eksplorasi belum banyak dilakukan. Minimnya data juga berdampak pada bertambahnya biaya yang harus dikeluarkan KKKS untuk

melakukan eksplorasi. Selain itu, kegiatan untuk mendapatkan data awal menjadi lebih berisiko dibandingkan dengan wilayah lain. Persoalan lainnya adalah kondisi sosial di Indonesia bagian Timur yang hingga saat ini masih banyak masyarakat dan pemerintah daerahnya belum memahami karakteristik industri hulu migas.

Pemerintah harus segera menyelesaikan persoalan-persoalan dalam pengelolaan hulu migas terutama infrastruktur yang kurang memadai. Selain untuk meyakinkan KKKS bahwa sejumlah wilayah kerja migas di Indonesia bagian Timur memang ekonomis untuk dikembangkan, hal ini juga akan berdampak positif terhadap iklim investasi hulu migas secara nasional.

Atensi DPR

Indonesia memiliki potensi sumber daya migas yang sangat besar di area Warim di Papua. Besarnya potensi migas di area Warim tersebut tentu perlu diupayakan untuk dikembangkan oleh pemerintah. Namun, terdapat beberapa persoalan yang harus segera diselesaikan pemerintah untuk dapat mengoptimalkan pengelolaan hulu migas di Indonesia bagian Timur, khususnya Papua. DPR RI khususnya Komisi VII DPR RI yang membidangi energi, riset, inovasi, dan industri perlu mendorong pemerintah untuk segera menyelesaikan berbagai persoalan yang menghambat dalam upaya mengoptimalkan pengelolaan hulu migas di Indonesia bagian Timur, terutama persoalan infrastruktur yang kurang memadai sehingga potensi migas dapat dimanfaatkan secara maksimal dan Indonesia tidak kehilangan devisa.

Sumber

Bisnis Indonesia, 17 Mei 2023; dan
cnbcindonesia.com, 18 Mei 2023.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>

@anlegbkdoofficial

EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Ekkuinbang
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Rafika Sari
Eka Budiyantri
Dewi Wuryandani

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2023